

# **LAPORAN**

## **HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**APRIL s/d JUNI  
Tahun 2024**

## DAFTAR ISI

Halaman

### Kata Pengantar

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	2
D. Rencana Kerja .....	2

### BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian .....	4
1. Populasi dan Sampel .....	4
2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa .....	4
3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	5
4. Teknik Analisa Data.....	5
5. Tahapan Pelaksanaan .....	6

### BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden.....	8
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
2. Pekerjaan Responden .....	8
3. Domisili Responden .....	9
4. Kelompok Usia Responden .....	9
5. Layanan yang Digunakan .....	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	10
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
4. Indikator Transparansi Biaya.....	11
5. Indikator Biaya Tambahan.....	11
6. Indikator Hadiah, mendapat.....	11
7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	11
8. Indikator Percaloan.....	12
9. Indikator Perbuatan Curang.....	12
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	12
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	12

### BAB IV PENUTUP

Kesimpulan .....	16
Rekomendasi.....	16
Pengantar Kuisisioner IPK.....	18

### Lampiran

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB periode April 2024 s/d Juni 2024. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta untuk memenuhi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 dan Nomor 608/DJU/PS02/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB.

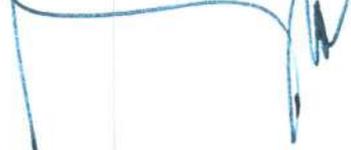
Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat Indeks Persepsi Anti Korupsi yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan utama pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 04 Juli 2024  
Ketua Tim Survei

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Widana Anggara Putra', written over a rectangular stamp area.

**WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai

diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

#### **D. Rencana Kerja**

##### **1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pelaksana
- b. Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- c. Penyiapan Bahan
- d. Kuesioner.
- e. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- f. Kelengkapan peralatan.
- g. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- h. Jumlah Responden.
- i. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- j. Penyusunan Jadwal
- k. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **2. Pelaksanaan Pengolahan Data**

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh Responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya diolah untuk membuat laporan.

### **3. Pengujian kualitas dan validitas data.**

Data pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas Responden.

### **4. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam beberapa periode semester.

## **BAB II METODOLOGI**

### **Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **1. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

*Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan datang ke kantor dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Unit analisis

adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu antara Januari 2024 s/d Maret 2024. Selanjutnya data diolah untuk laporan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan Responden, sekaligus memastikan apakah Responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

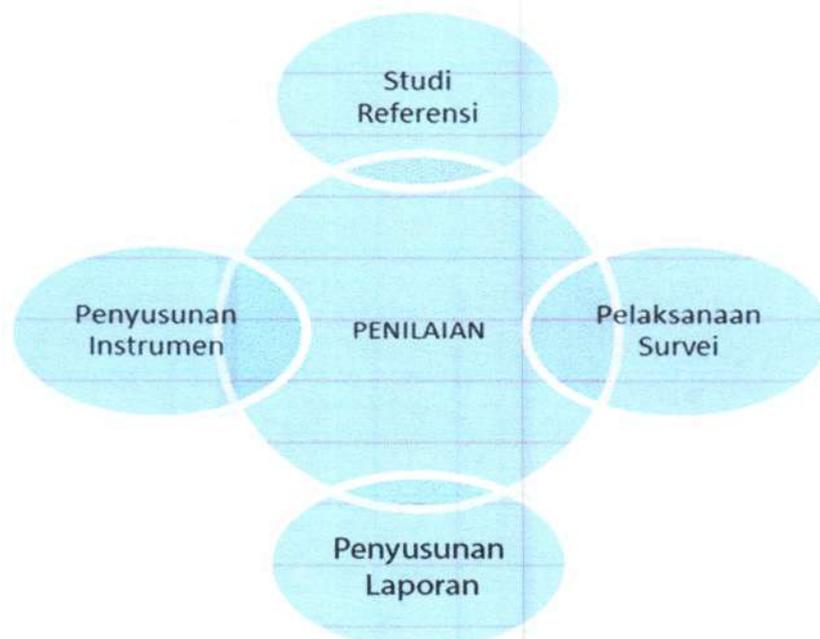
- a. *Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

#### 5. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

**Tabel 1.**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2.**

**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3.**

**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

### BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### A. Profil Responden

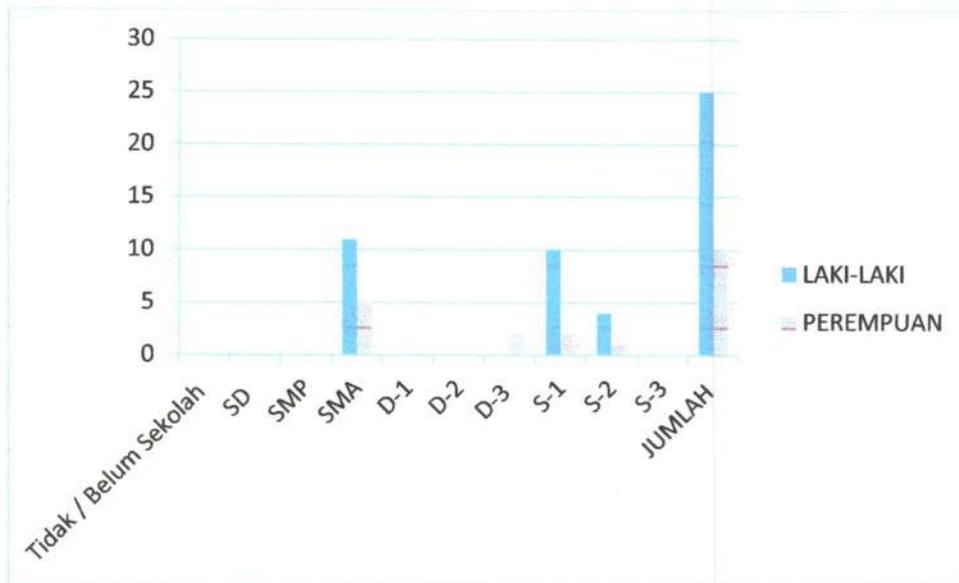
##### 1. Tingkat pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SMA yaitu 16 responden (45 %).

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan Responden**

Pendidikan				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Tidak / Belum Sekolah	-	-	-
2	SD	-	-	-
3	SMP	-	-	-
4	SMU	5	11	16
5	D-1	-	-	-
6	D-2	-	-	-
7	D-3	2	-	2
8	S-1	2	10	12
9	S-2	1	4	5
10	S-3	-	-	-
JUMLAH		10	25	35

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## 2. Pekerjaan Responden

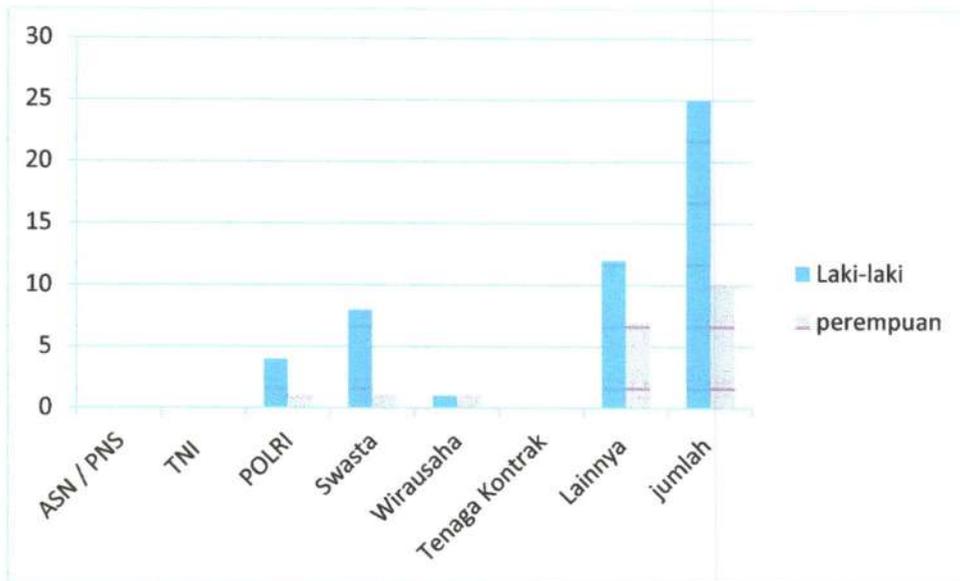
Dari sisi jenis pekerjaan Responden, menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 19 Responden (54,28 %) pengguna layanan teridentifikasi berprofesi sebagai Lainnya.

**Tabel 5.**

### Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	ASN / PNS	-	-	0
2	TNI	-	-	0
3	POLRI	1	4	5
4	Swasta	1	8	9
5	Wirausaha	1	1	2
6	Tenaga Kontrak	-	-	0
7	Lainnya	7	12	19
JUMLAH		10	25	35

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



### 3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, Responden paling banyak berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 35 Responden (100 %).

**Tabel 6.**

**Domisili Responden**

Domisili				
NO.	DOMISILI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Kalimantan Tengah	10	25	35
	JUMLAH	10	25	35

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



#### 4. Kelompok Usia Responden

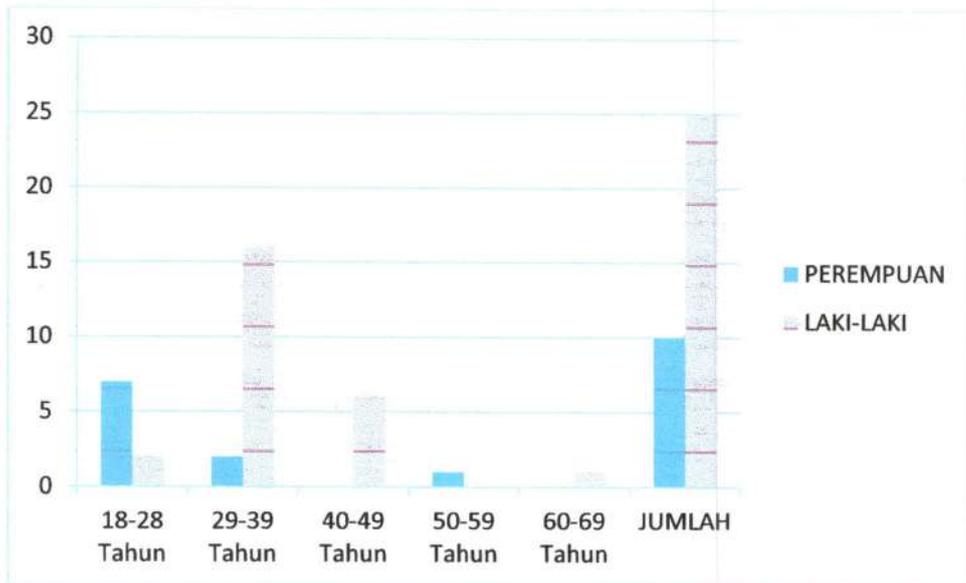
Sementara itu jika melihat Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun sebanyak 18 Responden (51,42 %).

**Tabel 7.**

#### Usia Responden

<b>Pekerjaan</b>				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	18 s/d 28 Tahun	7	2	9
2	29 s/d 39 Tahun	2	16	18
3	40 s/d 49 Tahun	-	6	6
4	50 s/d 59 Tahun	1	-	1
5	60 s/d 69 Tahun	-	1	1
<b>JUMLAH</b>		10	25	35

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



### 5. Layanan yang digunakan

Layanan Perdata menjadi jenis pelayanan yang paling banyak digunakan oleh Responden, yaitu sebanyak 18 Responden ( 40 %).

**Tabel 8.**

**Jenis Layanan yang Dipergunakan Responden**

JENIS LAYANAN				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Perdata	7	2	7
2	Pidana	2	16	8
3	Hukum	-	6	20
JUMLAH		10	25	35

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

### 1. Indikator Manipulasi Peraturan

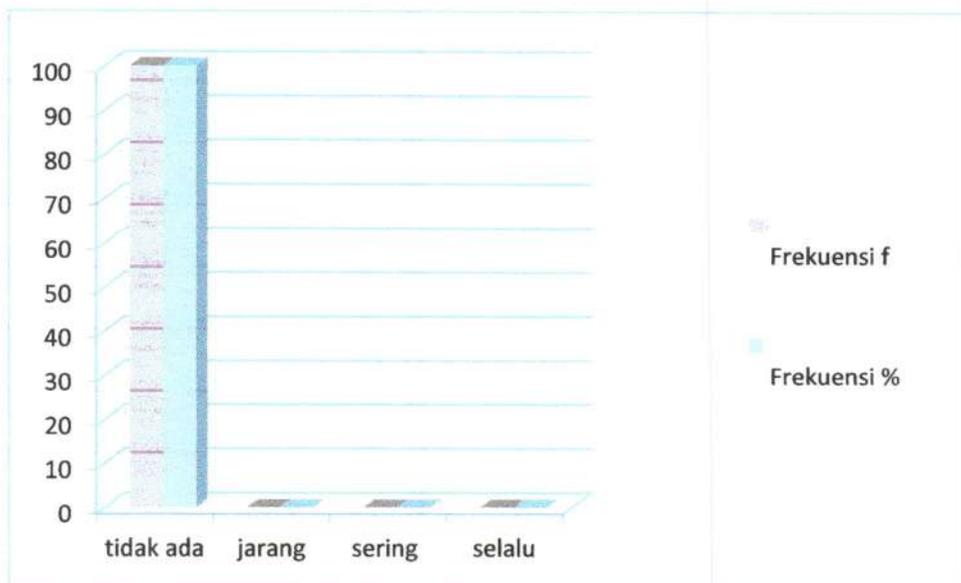
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang, yang keseluruhannya menilai petugas melayani sesuai prosedur yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari Manipulasi Peraturan.

**Tabel 9.**

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak ada	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa menyalahgunakan jabatan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

**Tabel 10.**

### **Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tanpa Meminta Imbalan	4	100	100
2	Jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



### 3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang, yang menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan tanpa menjual pengaruh. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

**Tabel 11.**

#### **Indeks pada indikator menjual pengaruh**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	100	100
2	jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



#### 4. Indikator Transparansi Biaya

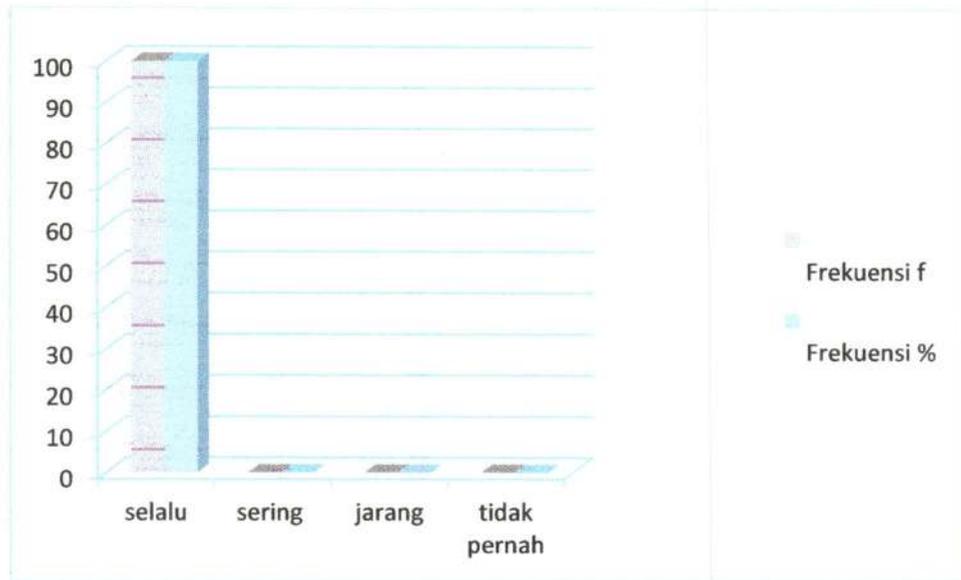
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang keseluruhannya menilai petugas. Transparan dalam menjelaskan biaya perkara. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dalam hal tarif dan biaya.

**Tabel 12.**

**Indeks pada indikator transparansi biaya**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	100	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



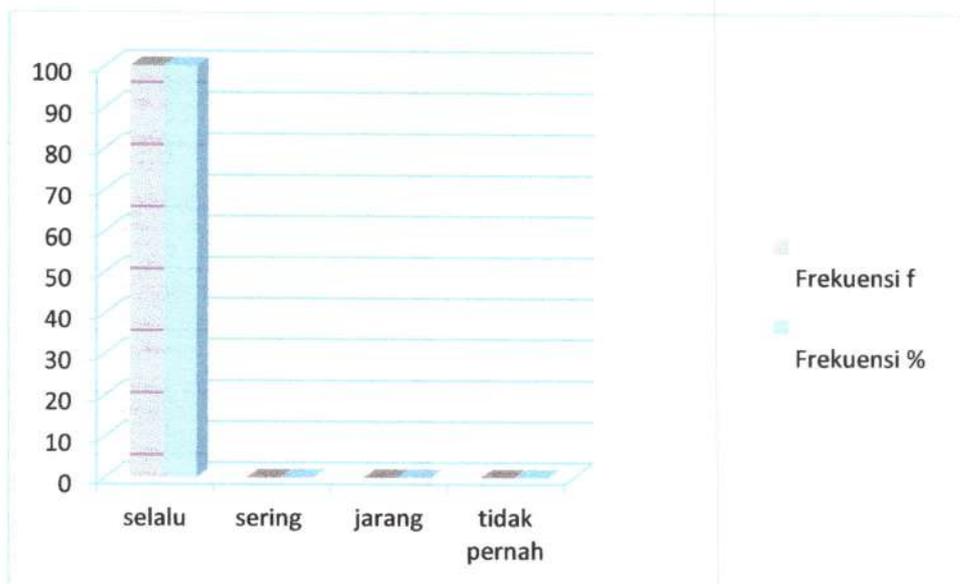
### 5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang keseluruhannya menilai petugas dalam melayani tanpa meminta biaya tambahan yang sifatnya tidak resmi. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari biaya tambahan/pungli.

**Tabel 13.**  
**Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	100	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



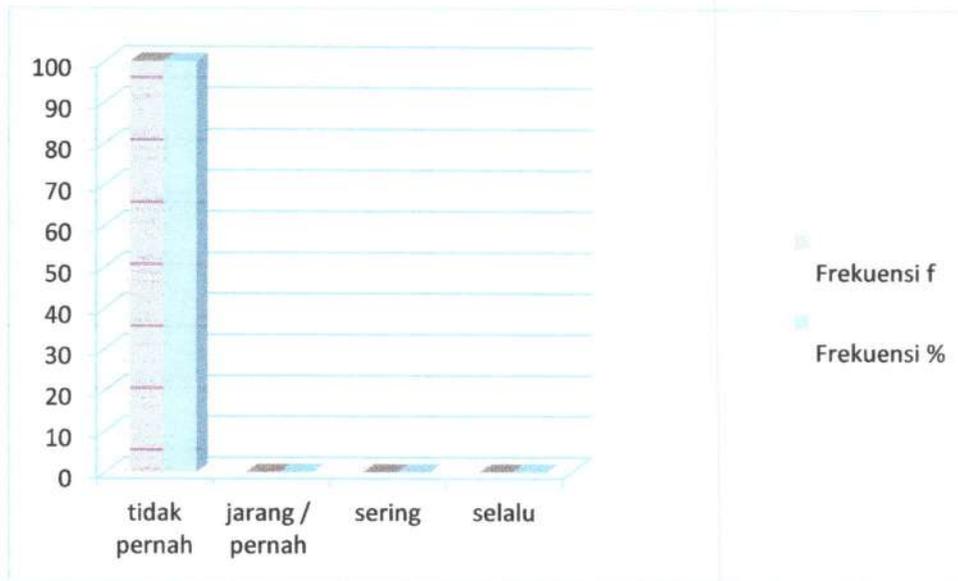
## 6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa meminta hadiah. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator Hadiah**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang / pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



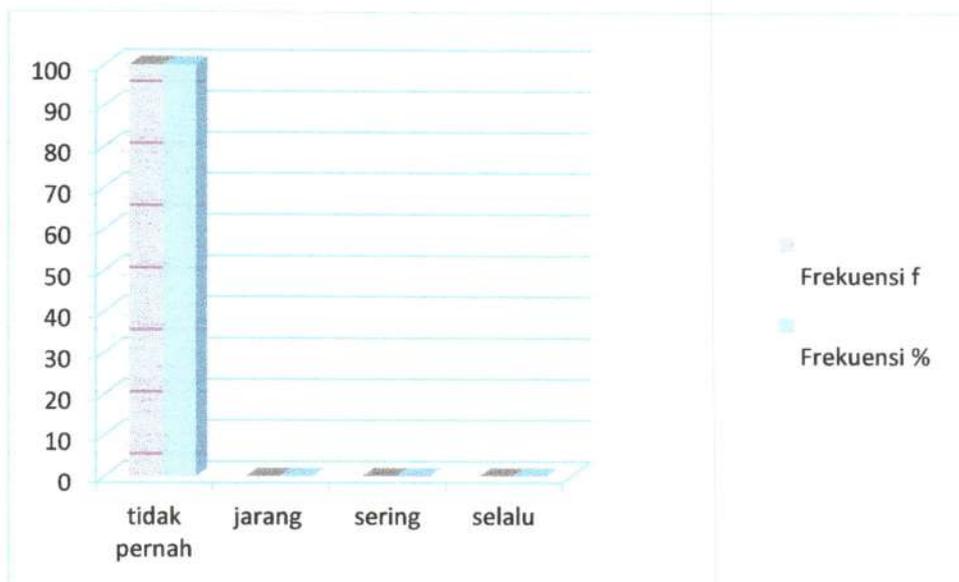
### 7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



### 8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada praktek percaloan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dan bersih dari praktik percaloan.

**Tabel 16.**  
**Indeks pada indikator Percaloan**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



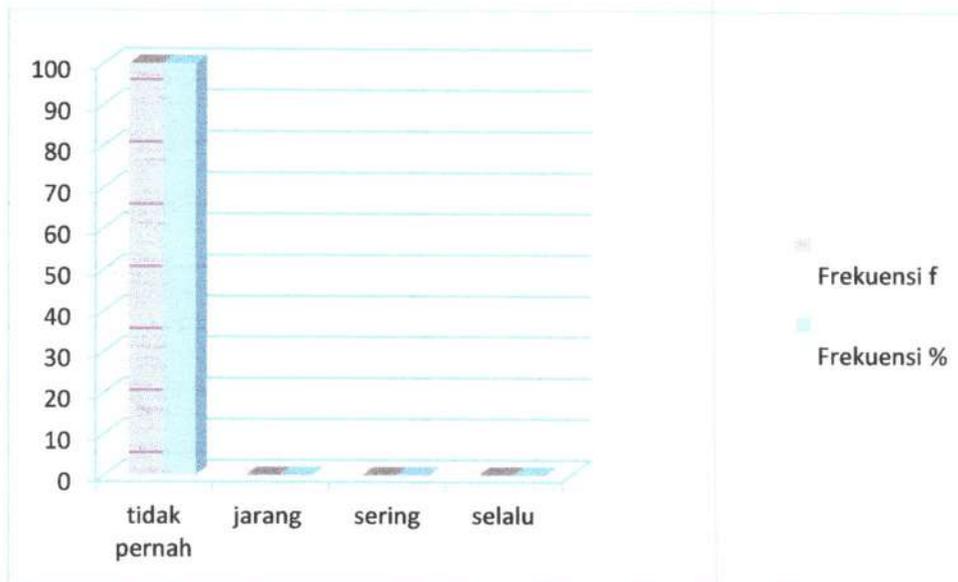
### 9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada perbuatan curang. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

**Tabel 17.**  
**Indeks pada indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



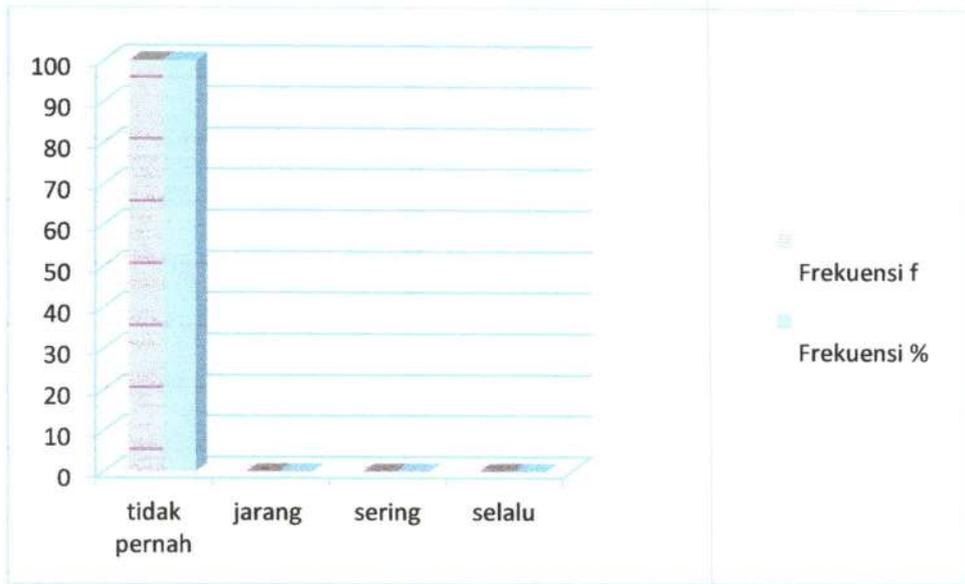
### 10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 35 Orang menilai bahwa pelayanan tanpa adanya transaksi rahasia. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari praktik pengurusan perkara.

**Tabel 18.**  
**Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



**C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA  
PENGADILAN**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **4,00**. Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **100 %**.

**Tabel 19.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**

**Satuan Kerja pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tetap Meningkatkan Pelayanan untuk masyarakat
2	Agar lebih ditingkatkan 3S
3	Tetap tingkatkan kebersihan
4	Ruang tunggu sidang dan PTSP agar lebih nyaman
5	Tingkatkan pelayanan administrasinya

**Data Responden**

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/ JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Faiq Arif H R-099134- IPAK- 223036DF61	KALIMAN TAN TENGAH	23 Tahun Laki- laki	SMU POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Juni 2024
2	Putri R-099134- IPAK- 7A73DEB8C4	KALIMAN TAN TENGAH	27 Tahun Perem- puan	Diplo- ma 3 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Juni 2024
3	H. ALI RAHMAT, S.H. R-099134- IPAK- 9428CBD5D6	KALIMAN TAN TENGAH	42 Tahun Laki- laki	S1 SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2024
4	Reformas Agung Gumelar, S.Sos R-099134- IPAK- E2F23F028D	KALIMAN TAN TENGAH	27 Tahun Laki- laki	S1 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Juni 2024
5	Sutejo, S.H., M.H R-099134- IPAK- 3D48A26D0A	KALIMAN TAN TENGAH	29 Tahun Laki- laki	S2 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Juni 2024
6	Rahmadi Hutagalung R-099134- IPAK-	KALIMAN TAN TENGAH	30 Tahun Laki-	SMU POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2024

	7B2D3D7125		laki												
7	Cristian Nibel R-099134- IPAK- 4F464B18FD	KALIMAN TAN TENGAH	34 Tahun Laki- laki	S1 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Juni 2024
8	Rahadi Diah Marlianti R-099134- IPAK- CD1E4E64A4	KALIMAN TAN TENGAH	27 Tahun Perem- puan	S1LAI NNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Juni 2024
9	YAHNES IGNASH PRAYOGA, S.Psi R-099134- IPAK- EC1E5FDE53	KALIMAN TAN TENGAH	38 Tahun Laki- laki	S1 SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Juni 2024
10	Bangun Adi P R-099134- IPAK- 6219C1275B	KALIMAN TAN TENGAH	38 Tahun Laki- laki	SMU LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Juni 2024
11	Yulianto R-099134- IPAK- 52480BDD08	KALIMAN TAN TENGAH	33 Tahun Laki- laki	SMU LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Juni 2024
12	Rendy Candra Prasetya R-099134- IPAK- 455AE6A7D8	KALIMAN TAN TENGAH	30 Tahun Laki- laki	S1 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Mei 2024
13	Lalu Kassatria Dwi Sanjaya R-099134- IPAK- 19610F6FF4	KALIMAN TAN TENGAH	36 Tahun Laki- laki	SMU SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Mei 2024
14	Khoirul Anwar R-099134- IPAK- E41D487848	KALIMAN TAN TENGAH	33 Tahun Laki- laki	SMU SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Mei 2024
15	Radilla R-099134- IPAK- 3BC2E93A86	KALIMAN TAN TENGAH	40 Tahun Laki- laki	SMU SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Mei 2024
16	Eka Wardana R-099134- IPAK-	KALIMAN TAN TENGAH	36 Tahun Laki-	SMU LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Mei 2024

	SE5F924CC9		laki													
17	Emiliana Eti Astuti R-099134-IPAK-2E9CFD95AA	KALIMAN TAN TENGAH	35 Tahun Perempuan	S1 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Mei 2024
18	Edy Ahmad Nurkojin, SH R-099134-IPAK-E670F36ACA	KALIMAN TAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Mei 2024
19	Sutejo, S.H., M.H R-099134-IPAK-D60F65941E	KALIMAN TAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S2 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Mei 2024
20	Andri Sutrisno, S.H R-099134-IPAK-FD88442DA5	KALIMAN TAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1 POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Mei 2024
21	Viona Maulida R-099134-IPAK-128498E4F3 No. HP 81549700158	KALIMAN TAN TENGAH	27 Tahun Perempuan	SMU LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Mei 2024
22	Akhmad Fauzi R-099134-IPAK-451D819CF1	PAPUA BARAT	36 Tahun Laki-laki	SMUP OLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Mei 2024
23	Ahmad Syamsudin R-099134-IPAK-D17060ADA6	KALIMAN TAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	SMUS WASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Mei 2024
24	Ismiati R-099134-IPAK-47D39C231F	KALIMAN TAN TENGAH	26 Tahun Perempuan	SMU SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Mei 2024
25	Beni Firmansyah R-099134-IPAK-799CC8C72B	KALIMAN TAN TENGAH	36 Tahun Laki-laki	S1 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Mei 2024

26	Lina Rosa R-099134- IPAK- 4D36D5AE92	KALIMAN TAN TENGAH	28 Tahun Perem puan	SMU POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
27	Supardi. S.H R-099134- IPAK- 26E5FC00EA	KALIMAN TAN TENGAH	60 Tahun Laki- laki	S1 SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
28	Kristiyani R-099134- IPAK- 846939D885	KALIMAN TAN TENGAH	38 Tahun Perem puan	SMU WIRA USAH A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
29	Tomi Irawan R-099134- IPAK- EFAAA8790B	KALIMAN TAN TENGAH	39 Tahun Laki- laki	SMU WIRA USAH A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
30	Cristian Nibel R-099134- IPAK- 6C0C1F8AF7	KALIMAN TAN TENGAH	34 Tahun Laki- laki	S1 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 April 2024
31	Viona Maulida R-099134- IPAK- A12950494C	KALIMAN TAN TENGAH	28 Tahun Perem puan	SMU LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 April 2024
32	Dorprawati Siburian, S.H., M.H. R-099134- IPAK- C0354096A3	KALIMAN TAN TENGAH	54 Tahun Perem puan	S2 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2024
33	Putri R-099134- IPAK- 7589F1526A	KALIMAN TAN TENGAH	27 Tahun Perem puan	Diplo ma 3 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 April 2024
34	Sutejo, S.H., M.H R-099134- IPAK- E3446F3DD6	KALIMAN TAN TENGAH	29 Tahun Laki- laki	S2 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 April 2024
35	Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn R-099134- IPAK- 4FOCA73FD6	KALIMAN TAN TENGAH	45 Tahun Laki- laki	S2 LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 April 2024

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

IPAK : Indeks Persepsi Anti Korupsi

\*) : Jumlah NRR IPAK Tertimbang

NRR Per RL : Jumlah nilai per unsur dibagi  
Jumlah kuesioner yang terisi

**IPAK : 4,00**

**Jumlah Responden 35**

**Bobot**

**Unsur Pertanyaan**

**Bobot NRR Tertimbang**

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Rangking Terendah & Tertinggi
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000	
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000	
Q 4	Transaksi Biaya	4,000	
Q 5	Biaya Tambahan	4,000	
Q 6	Hadiah	4,000	
Q 7	Tranparansi Biaya	4,000	
Q 8	Percaloan	4,000	
Q 9	Perbuatan Curang	4,000	
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000	
JUMLAH		40,000	

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 4,00 atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perangkungan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Berdasarkan Data Yang Dirangkum Untuk Survei Triwulan II Tidak Ada Nilai Terendah, Dikarenakan Semua Responden Memberikan Nilai 4,00 Terhadap Semua Indikator Yang Ditanyakan Sehingga Dalam Survei Triwulan II Ini Memperoleh Hasil Sesuai Yang Diharapkan.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000.
9. Indikator Pernustsn Curang, mendapat indeks 4.000.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000.

## B. Rekomendasi

Dikarenakan Semua Indikator Pertanyaan Mendapatkan Nilai 4.00, Maka Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode April s/d Juni 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian dari masyarakat dengan nilai 4,00 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Agar Pada Survei Triwulan III Tahun 2024 Mendapatkan Hasil Seperti Triwulan II Tahun 2024 Ini.

Akhir kata tidak ada rekomendasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini dikarenakan 10 kategori survey PN Pangkalan Bun masih dalam kategori sangat baik. Namun ada beberapa poin yang disampaikan yaitu :

1. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan Meskipun Pada Survei Triwulan II Semua Indikator Mendapatkan Nilai 4.00.
2. Hasil survei ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.

3. Survei ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah Responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representative.



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**  
Jalan Sutan Syahrir Nomor 16    Telepon : ( 0532 ) 21014 – 21179  
Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Website: [www.pn.pangkalanbun.go.id](http://www.pn.pangkalanbun.go.id) e-Mail: [pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)

---

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**  
Nomor : W16-U3/01/PB.01/II/2024

Para Pengguna Pengadilan yang terhormat,

Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna pengadilan sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Pangkalan Bun “PRIMA” Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel untuk mewujudkan institusi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mengetahui kondisi riil pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini terkait dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan Survei Persepsi Korupsi dengan melibatkan para pengguna pengadilan sebagai Responden. Mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) para pengguna pengadilan berkenan mengisi kuesioner yang kami edarkan dengan sejujurnya dan apa adanya. Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan di dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 04 Juli 2024  
Koordinator Survey

**WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**

Dasar Hukum:

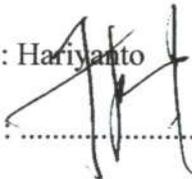
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama : Hiskia J. Aritonang.
- Tanda Tangan :  .....
- Tanggal Pelaksana : .....

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama : Hariyanto
- Tanda Tangan :  .....
- Tanggal Pelaksana : .....

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama : Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.
- Tanda Tangan :  .....
- Tanggal Pelaksana : .....



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201



**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB  
TRIWULAN II  
Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024**

<p><b>SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI NILAI INDEKS</b></p> <p><b>4,00 / 100%</b></p> <p><b>KATEGORI "SANGAT BAIK"</b></p>	<p>Jumlah : 35 Responden</p>
	<p>Jenis Kelamin :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laki-laki 25</li><li>- Perempuan 10</li></ul> <p>Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak / Belum Sekolah : 0</li><li>- SD : 0</li><li>- SMP : 0</li><li>- SMU : 16</li><li>- D-1 : 0</li><li>- D-2 : 0</li><li>- D-3 : 2</li><li>- S-1 : 12</li><li>- S-2 : 5</li><li>- S-3 : 0</li></ul> <p>Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PNS : 0</li><li>- TNI : 0</li><li>- POLRI : 5</li><li>- SWASTA : 9</li><li>- WIRAUSAHA : 2</li><li>- TENAGA KONTRAK :</li><li>- LAINNYA : 19</li></ul>

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS  
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Koordinator Tim Survei

**WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum..**

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2024**

**IDENTITAS RESPONDEN :**

1. Nama : .....(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : .....
3. Umur (Tahun) : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan \*)
5. Pendidikan terakhir :
  1. Tidak sekolah
  2. SD
  3. SMP/SLTP
  4. SLTA
  5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
  6. Sarjana (S1)
  7. Pasca Sarjana (S2/S3)
5. Pekerjaan Utama :
  1. PNS
  2. TNI/Polri
  3. Pegawai Swasta
  4. Wiraswasta
  5. Petani/Nelayan
  6. Pedagang
  7. Pelajar / Mahasiswa
  8. Lainnya .....
6. Domisili/Tempat Tinggal : .....
7. Jenis Layanan yang Digunakan : .....

**PETUNJUK :**

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner  
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang ( X ) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

**Kuisisioner IPK :**

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	1 2 3 4
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	1 2 3 4

3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4

Berdasarkan Survei Elektronik yang digunakan pada periode 01 April 2024 /d 30 Juni 2024

[http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol\\_ipk](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**Jalan** Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014  
**Fax.** (0532) 21179 **Website:** www.pn-pangkalanbun.go.id **e-Mail:** pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : /KPN.W16-U3/UND.HK1.2.1/IV/2024 Pangkalan Bun, 04 Juli 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode April 2024 - Juni 2024

Yth.

1. Seluruh Hakim
2. Sekretaris
3. Seluruh Panitera Muda
4. Seluruh Kepala Sub Bagian
5. Koordinator Tim Survei
6. Tim Suvei

di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode April 2024 - Juni 2024, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Jumat, 05 Juli 2024  
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai.  
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  
Acara : Rapat Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode April 2024 - Juni 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri  
Pangkalan Bun,

I Gede Putu Saptawan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: [www.pn-pangkalanbun.go.id](http://www.pn-pangkalanbun.go.id) e-Mail: [pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)

---

NOTULA

- Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Hari : Kamis
- Tanggal : 5 Juli 2024
- Pukul : 13.30 WIB
- Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Acara : Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode April 2024 – Juni 2024
- Peserta Rapat :  
1. Seluruh Hakim  
2. Sekretaris  
3. Seluruh Panitera Muda  
4. Seluruh Kepala Sub Bagian  
5. Koordinator Tim Survei  
6. Tim Suvei

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Predikat yang diperoleh dari berbagai ruang lingkup penilaian survey IKM dan IPAK tersebut merupakan cerminan pelayanan yang telah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berikan kepada Masyarakat dan Instansi Pemerintahan Terkait. Merespon penilaian itu, terhadap tiga indikator dengan predikat tertinggi untuk selalu dijaga bahkan ditingkatkan sedangkan terkhusus untuk tiga indikator dengan predikat terendah agar

dilakukan koreksi walaupun sebenarnya predikat yang diberikan masih dalam kategori sangat baik;

(Laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

1. Perlu dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan Kesekretariatan maupun evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala agar Produk Spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan selalu berkualitas prima
2. Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 1B harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya publikasi prosedur yaitu selain mendatangi PTSP, Masyarakat bisa juga bisa mendapatkan informasi prosedur melalui hotlinecall PTSP ataupun AVILA pada laman website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 1B bila ada pertanyaan seputar prosedur.

(Ketidaksesuaian)

NIHIL

(Rekomendasi atas ketidaksesuaian)

NIHIL

Nama Notulis,



Dimas Edi Trianto

NIP. 19992106 202405 1 001

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun,



I Gede Putu Saptawan

NIP. 19680909 199403 1 005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

**DAFTAR HADIR**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.	KETUA	
2.	ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H	HAKIM	
3.	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.	HAKIM	
4.	WAHYUDI, S.H.	PANMUD PERDATA	
5.	MASRIANOR, S.H.	PANMUD PIDANA	
6.	HARIYANTO	PANMUD HUKUM	
7.	DIMAS EDI T, S.H.	CPNS	
8.	BAYU SISTIAWAN, A.Md.,S.H.	PANITERA PENGGANTI	
9.	MAYA AGUSTIN, A.H.	PANITERA PENGGANTI	
10.	HIZKIA A.	STAFF HUKUM	
11.	EGA A.	PTSP HUKUM	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: [www.pn-pangkalanbun.go.id](http://www.pn-pangkalanbun.go.id) e-Mail: [pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)

DOKUMENTASI



# **LAPORAN TINDAK LANJUT**

**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB  
TRIWULAN II TAHUN 2024  
APRIL s/d JUNI**

**A. HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB.**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB diperoleh informasi atau data bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.

**B. REKOMENDASI**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Triwulan II April – Juni Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 4,00 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dikarenakan Semua nilai Indikator 4.00, Maka Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan

**Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode April - Juni Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian dari masyarakat dengan nilai 4,00 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.**

**Meskipun demikian, agar seluruh warga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tetap selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada publik sesuai yang telah ditetapkan. Terhadap seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimana telah diperintahkan untuk membiasakan diri melakukan pelayanan secara maksimal dan sebaik mungkin kepada masyarakat.**

**Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Agar Pada Survei Triwulan III Tahun 2024 Mendapatkan Hasil Seperti Triwulan II tahun 2024 Ini.**

### **C. TINDAK LANJUT DARI HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI.**

**Hasil Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Triwulan I Januari - Maret Tahun 2024 diperoleh tingkat Indeks Persepsi Korupsi dengan memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Namun seluruh jajaran Pengadilan**

Negeri Pangkalan Bun harus konsisten melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar mempertahankan serta terus meningkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang lebih baik.

Akhir kata tidak ada rekomendasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini dikarenakan 10 kategori survey Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih dalam kategori sangat baik. Namun ada beberapa poin yang disampaikan yaitu :

1. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan Meskipun Pada Survei Triwulan I Tahun 2024 Semua Indikator Mendapatkan Nilai 4.00.
2. Hasil survei ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.
3. Survei ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah Responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representative.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN**



**I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M Hum.**